BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

a. Sejarah Bank bjb

Sejarah Pendirian - 1961

Pendirian Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dilatar belakangi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 1960 tentang penentuan perusahaan di Indonesia milik Belanda yang dinasionalisasi. Salah satu perusahaan milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yang dinasionalisasi yaitu NV Denis (*De Erste Nederlansche Indische Shareholding*) yang sebelumnya perusahaan tersebut bergerak di bidang bank hipotek. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 1960 Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan Akta Notaris Noezar nomor 152 tanggal 21 Maret 1961 dan nomor 184 tanggal 13 Mei 1961 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat nomor 7/GKDH/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961, mendirikan PD Bank Karya Pembangunan dengan modal dasar untuk pertama kali berasal dari Kas Daerah sebesar Rp. 2.500.000,00.

Perubahan Badan usaha - 1978

Untuk menyempurnakan kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat, dikeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 11/PD-DPRD/72 tanggal 27 Juni 1972 tentang kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat sebagai perusahaan daerah yang berusaha di bidang perbankan. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 1/DP-040/PD/1978 tanggal 27 Juni 1978, nama PD. Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat.

Peningkatan Aktivitas - 1992

Pada tahun 1992 aktivitas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ditingkatkan menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992 serta berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 1995 mempunyai sebutan “ Bank Jabar “ dengan logo baru.

Perubahan Bentuk Hukum - 1998

Dalam rangka mengikuti perkembangan perekonomian dan perbankan, maka berdasarkan Perda Nomor 22 Tahun 1998 dan Akta Pendirian Nomor 4 Tanggal 8 April 1999 berikut Akta Perbaikan Nomor 8 Tanggal 15 April 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 16 April 1999, bentuk

hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Perluasan Bentuk Usaha – Dual Banking System 2000

Dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat akan jasa layanan perbankan yang berlandaskan Syariah, maka sesuai dengan izin Bank Indonesia No. 2/ 18/DpG/DPIP tanggal 12 April 2000, sejak tanggal 15 April 2000 Bank Jabar menjadi Bank Pembangunan Daerah pertama di Indonesia yang menjalankan dual banking system, yaitu memberikan layanan perbankan dengan sistem konvensional dan dengan sistem syariah.

b. Sejarah Bank bjb cabang Braga

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat adalah Bank milik pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Jawa Barat dan Banten, pendirianya dilatar belakangi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.33 Tahun 1960 tentang penentuan perusahaan di Indonesia milik Belanda yang dinasionalisasi. Salah satu perusahaan milik Belanda yang berkedudukan di Bandung yang dinasionalisasi yaitu NV Denis (*De Erste Nederlansche Indische Shareholding*) yang sebelumnya perusahaan tersebut bergerak di didang bank hipotek. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 1960 Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan Akta Notaris Noezar nomor 152 tanggal 21 Maret 1961 dan nomor 184 tanggal 13 Mei 1961 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat nomor 7/GKDH/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961,mendirikan PT.Bank

Karya Pembangunan dengan modal dasar untuk pertama kali berasal dari Kas Daerah sebesar Rp.2.500.000,00.

Untuk menyempurnakan kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat dikeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 11/PD-DPRD/72 tanggal 27 Juni 1972 tentang kedudukan hokum Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat sebagai perusahaan daerah yang berusaha di bidang perbankan.

Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat nomor 1/DP-040/pd/1978 tanggal 27 Juni 1978,nama PD. Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat.Pada tahun 1992 aktivitas Pembangunan Daerah Jawa Barat disingkat menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 25/84/KEP/DIR Tanggal 2 November 1992 serta berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 1995 mempunyai sebutan “Bank Jabar” dengan logo baru. Namun tahun 2010 logo tersebut diubah kembali menjadi logo yang lebih baru, tujuanya adalah untuk menambah warna baru di Bank bjb yang sekarang ini.



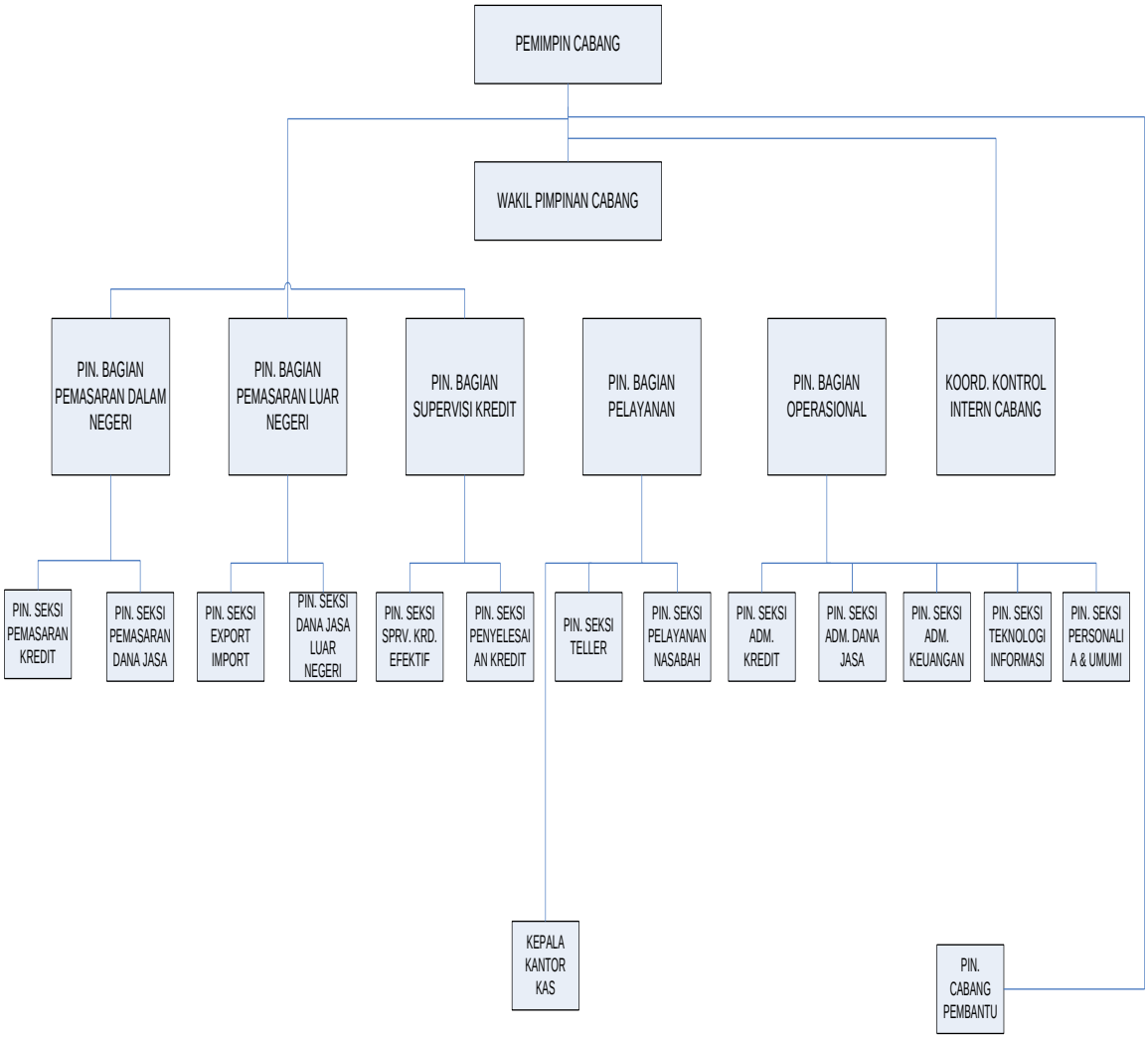
Dalam rangka mengikuti perkembangan perekonomian dan perbankan, maka berdasarkan Perda Nomor 4 Tanggal 8 April 1999 yang telah disahkan oleh

Mentri Kehakiman RI tanggal 16 April 1999,bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat akan jasa layanan perbankan yang berlandaskan Syariah, maka sesuai dengan izin Bank Indonesia No.2/18/DpG/DPIP tanggal 12 April 2000 Bank Jabar menjadi Bank Pembangunan Daerah pertama di Indonesia yang menjalankan dual banking system, yaitu memberikan layanan perbankan dengan system konvensional dan dengan system syariah.

Untuk memberikan keleluasaan dalam melaksanakan ekspansi usaha, berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan pada tanggal 16 April 2001, disetujui peningkatan modal dasar Bank Jabar menjadi Rp.1 Triliun. Selanjutnya berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan pada tanggal 14 April 2004 dengan akta No.10 Tanggal 14 April 2004, modal dasar Bank Jabar dinaikan dari Rp.1 Triliun menjadi Rp.2 Triliun. Melihat perkembangan yang terus meningkat dan prospek usaha yang terus membaik maka pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 5 April 2006 ditetapkan bahwa modal dasar Bank Jabar naik dari Rp.2 Triliun menjadi Rp.4 Triliun.

2.2. Sruktur Organisasi Perusahaan



Sumber PT.Bank Jabar Banten Cabang Utama Bandung

Gambar 2.1

Struktur Organisasi PT. Bank Jabar Banten KCP Utama Bandung

2.3. Uraian Tugas atau Jabatan

Secara garis besar pembagian tanggung jawab dan tugas serta wewenang masing-masing bagian yang ada pada Bank BJB Kantor Cabang Pembantu Bandung adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin Cabang

Tugas pemimpin cabang adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan misi kantor cabang secara keseluruhan, yaitu membantu direksi untuk memperoleh laba yang wajar melalui penyediaan produk dan jasa perbankan yang dibutuhkan masyarakat di daerah cabang, mendorong pemberdayaan ekonomi serta berfungi sebagai pengelola uang daerah, dalam rangka mewujudkan bank yang berkembang secara sehat, dinamis, mandiri, dan terpercaya dan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pendapatan asli daerah.
b. Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur
c. Merencanakan, mengebangkan, melaksakan, serta mengelola bisinis di wilayah kerja cabang.
d. Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan, serta mengelola layanan unggul kepada nasabah.
e. Memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap upaya pencapaian laba bank secara keseluruhan.

f. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta kegiatan.

2. Wakil Pimpinan Cabang

Tugas pemimpin cabang utama adalah sebagai berikut :

a. Mengelola pelaksanaan system prosedur bidang pelayanan dan operasional.
b. Mengelola pelayanan produk dan jasa.
c. Mengelola permohonan kartu ATM.
d. Mengelola pelayanan transaksi tunai, pemindah bukuan, dan kliring.
e. Mengelola kas ATM.
f. Menglola uang daerah.
g. Mengelola administrasi keuangan dan laporan keuangan cabang.
h. Mengelola logistic, kerumah tangganaan, kearsipan administrasi lainnya serta peraturan perundang-undanganyang berlaku.
i. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta kegiatan.

3. Pemimpin Bagian Pemasaran Dalam Negeri

Tugas pemimpin bagian pemasaran dalam negeri adalah sebagai berikut :

a. Mengelola pelaksanaan system dan prosedur bidang pemasaran dalam negeri.
b. Menelola pemasaran produk dan jasa dalam negeri.
c. Memproses permohonan serta mengeloala kredit.

d. Mampu mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kegiatannya.
e. Melaksanakan kepatuhan terhadap system dan prosedur peraturan Bank Indonesia serta peraturan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

4. Pemimpin Bagian Pemasaran Luar Negeri

Tugas pemimpin bagian pemasaran luar negeri adalah sebagai berikut :

a. Mengelola pelaksanaan system dan prosedur bidang pemasaran luar negeri.
b. Mengelola pemasaran produl dan jasa luar negeri.
c. Mengelola pelayanan produk luar negeri.
d. Memproses serta mengelola transaksi L/C produk dan jasa luar negeri.
e. Melakukan penelitian potensi pemasaran produk da jasa luar negeri daerah kerja cabang.
f. Melaksanakan kepatuhan terhadap system prosedur, peraturan Bank Indonesia dan Undang-undang yang berlaku.
g. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kegiatannya.

5. Pemimpin Bagian Supervisi Kredit

Tugas pemimpin bagian supervisi kredit adalah sebagai berikut :

a. Mengelola pelaksanaan system dan prosedur bidang supervisi kredit.

b. Mengelola penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah dan kredit hapus buku.
c. Mengelola pengendalian kredit.
d. Mengelola kolektabilitas kredit.
e. Melakukan pembinaan kepada debitur bermasalah.
f. Melaksanakan pembinaan kepada debitur, system dan prosedur, peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
g. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kegiatannya.

6. Pemimpin Bagian Pelayanan

Tugas pemimpin bagian pelayanan adalah sebagai berikut :

a. Mengelola pelayanan system da prosedur bidang pelayanan.
b. Mengelola pelayanan unggul kepada nasabah.
c. Mengelola pelayanan transaksi tunai da pemindah bukuan.
d. Mengelola pelayanan uang daerah.
e. Mengelola pelayanan kartu ATM.
f. Mengelolal kas ATM.
g. Mengelola pendayagunaan kas secara optimal.
h. Melaksanakan kepatuhan terhadap system dan prosedur, peraturan BI, dan peraturan perundangan yang berlaku.
i. Mepertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kegiatannya.
j.

7. Pemimpin Bagian Operasional

Tugas pemimpin bagian operasional adalah sebagai berikut :

a. Mengawasi dan bertanggung jawab atas setiap amnistrasi transaksi.
b. Membantu pemimpin cabang dalam merencanakan dan melaksanakan serta monitoring rencana kerja dan kegiatan bank.
c. Mengelola segala teknologi informasi yang digunakan.
d. Memabantu pemimpin cabang dalam mengendalikan keputusan terhadap system prosedur, peraturan BI dan UU yang berlaku.
e. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kegiatannya.

8. Koordinasi Kontrol Intern Cabang

Tugas dari Koordinasi Kontrol Intern Cabang yaitu mengawasi keadaan di Bank bjb Bandung Cabang Braga mulai dari bagian depan bank atau teller maupun bagian kantor bank (administrasi). Secara tidak langsung Koordinasi Kontrol Intern Cabang mengontrol koordinasi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh bank.

2.4. Aspek Kegiatan PT. Bank Jabar Banten KCP Utama Bandung

PT. Bank Jabar Banten didirikan dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah di segala bidang agar tercapai peningkatan taraf hidup rakyat. PT Bank Jabar Banten merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang keuangan/perbankan yang menjalankan usahanya sebagai bank umum.

Dan berikut ini adalah mengenai aktivitas operasional diantaranya sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dalam bentuk sebagai berikut :
   a. Deposito (Rupiah dan Valuta asing)
   b. Giro (Rupiah dan Valuta Asing)
   c. Tabunga Tandamata.
   d. Tabungan Simpeda.
   e. Tabungan Tabah.
   f. Giro Pemda.

2. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit, baik jangka pendek, jangka menengah, jamgka panjang kepada perusahaan atau pengusaha untuk keperluan pengembangan rehabilitasi dan modernisasi atau perorangan untuk dikonsumsi sendiri seperti :
   a. Kredit Investasi
   b. Kredit Modal Kerja Umum
   c. Kredit Usaha Kecil dan Menengah
   d. Kredit Modal Kerja Konstruksi
   e. Kredit Profesi
   f. Kredit Guna Bakti (KGB)
   g. Kredit Pegawai
   h. Kredit Kepemilikan Rumah
   i. Placemon (Penempatan Dana Dirksi Bank Lain)

j. Dan Lain-lain.

3. Jasa lainnya berupa :
   a. Transfer
   b. LLG (Lalu Lintas Giro)
   c. Kliring
   d. Menerima setoran pajak karena ditunjuk oleh kas negara, karena mendapat kepercayan dari Dirjen Pajak.
   e. Menerima setoran pajak karena ditunjuk oleh kas Negara, karena mendapat kepercayaan dari Dirjen Pajak.
4. Memberikan fasilitas jaminan bank. Maksudnya Bank Jabar Banten menjamin kredit kotruksi, bank jabar juga meminjam 10 % dari proyek / tender yang diadakan oleh suatu dinas, untuk debitur yang meyakini dnmengajukan surat dukungan bank.
5. Sebagai *Money Changer* (Mata Uang Asing)
6. Valas, dalam hal ini Bank Jabar Banten menyediakan fasilitas dala bentuk funding maupun landing dan jasa Bank lainnya dengan mata uang asing artinya produk tabungan maupun pinjaman dalam mata uang asing.
7. Jasa layanan pembayaran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)
8. Jasa layanan Devisa antara lain :
   a. Bidang ekspor melayani pembiayaan dan negoisasi dokumen ekspor dan penerimaan pajak.

b. Bidang impor melayani pembukuan Letter Of Credit (L/C), pembiayaan kredit impor dan penerimaan pajak.
c. Jasa luar negeri melayani Giro dan Deposito Valas, transfer dan inkaso luar negeri serta jual beli valas.

9. Menjaga kepercayaan masyarakat.